



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SEMARANG
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WIDOYONO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 155914

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/190 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 389 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 1342 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 203 m2/340 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 847.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 150 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOBIL, BMW SEDAN Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
4. MOBIL, SUZUKI KARIMUN WAGON MPV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. MOBIL, TOYOTA RUSH MPV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 270.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 951.217.644



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.768.217.644
III. HUTANG	Rp.	50.598.646
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.717.618.998

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.